

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemimpin adalah orang yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Pemimpin wajib bertindak mengayomi untuk mendorong dan membimbing. Di dalam Pancasila terkandung tiga asas yang harus dimiliki pemimpin. Pertama, asas *Ing Ngarsa Sung Tuladha* yang memiliki makna bahwa pemimpin haruslah mampu menjadi panutan bagi orang-orang yang mengikutinya dengan tindakan dari sifat dan perbuatannya. Lalu, *Ing Madya Mangun Karsa* yang berarti bahwa pemimpin diharuskan mampu untuk membangkitkan semangat berkeinginan dan berkreasi bagi orang-orang yang mengikutinya. Dan yang terakhir, *Tut Wuri Handayani* yang memiliki arti bahwa pemimpin berkewajiban mampu untuk mendorong dan berani berjalan paling depan serta sanggup bertanggung jawab pada orang-orang yang dipimpinnya (Wiryopranoto, 2017).

Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial atau negara yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala Pemerintahannya. Presiden, dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Negara ini merupakan bangsa yang secara formal merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, yang diakui dimulai dari Sabang sampai dengan Merauke (Soekarno, 1957).

Selama lebih dari tujuh puluh enam (76) tahun kemerdekaan Indonesia, telah memiliki tujuh presiden yang telah memimpin, diantaranya Soekarno dengan 22 tahun kepemimpinannya, Soeharto dengan 32 tahun kepemimpinannya, BJ Habibie 1 tahun masa jabatan, Abdurrahman Wahid 2 tahun masa kepemimpinannya, Megawati Soekarnoputri 1 periode, Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode, dan Joko Widodo yang saat ini sedang dalam periode keduanya sebagai presiden Indonesia (Nesaba, 2019). Diantara tujuh presiden yang sudah menjadi pemimpin Indonesia, ada dua pemimpin yang begitu bertolak belakang namun sesungguhnya memiliki banyak kesamaan dalam hal gaya kepemimpinan tentu dengan keunikannya masing-masing. Mereka adalah Soeharto dan Jokowi yang berbeda dalam segi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dengan negara Cina.

Gaya kepemimpinan sendiri dapat diartikan sebagai perilaku yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku atau strategi yang disukai serta sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Yang mana dapat diartikan bahwa gaya kepemimpinan adalah menyangkut tingkah laku dan cara jitu, sebagai hasil kolaborasi dari falsafah, kemampuan, sifat, serta sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba memengaruhi kinerja bawahannya dalam kehidupan sehari-hari (Rivai, 2014).

Kesamaan dan perbedaan biasanya beriringan dengan kehidupan, baik Soeharto maupun Jokowi keduanya dibesarkan oleh orang tua yang kurang mampu. Jokowi dalam acara Peninjauan program Membina Ekonomi keluarga Sejahtera

(Mekasar) asuhan PT Permodalan Nasional Di daerah Cilegon tepatnya di alun-alun kota, secara langsung menyampaikan bahwa ia berasal dari kalangan bawah, orang tuanya bekerja keras menjual bambu untuk makan dan bersekolah merangkap ayahnya yang bekerja sebagai supir. Sedangkan Soeharto sendiri adalah anak dari seorang petani (G. Roeger, 1990).

Sama halnya dengan Soeharto yang memang sedari kecil berangkat atas keinginannya untuk memulai jenjang karir dalam dunia militer, Jokowi pun dilansir dari presiden.id belajar dan sempat bekerja dibawah naungan pamannya di perusahaan swasta biasa. Dirasa kurang puas Jokowi menantang dirinya untuk mengembangkan diri dengan memulai bisnisnya sendiri yakni bisnis Mebeul.

Menjajaki kehidupan berkarirnya yang lain Jokowi memutuskan untuk berkecimpung dalam dunia perpolitikan, dan mencalonkan diri sebagai walikota Solo adalah suatu langkah awal. Jokowi berhasil melewati periode pertama kepemimpinannya pada 2005-2010 dengan sangat memuaskan, untuk itu dia terpilih kembali menjadi wali kota Solo. Akan tetapi, pada saat itu Jokowi tidak dapat menyelesaikan masa kepemimpinannya dan bertolak ke Jakarta atas permintaan Megawati yang menjabat sebagai Ketua PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), yang memintanya secara langsung untuk menawarkan diri menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 2012 silam. Pada saat ini pun Jokowi tidak berhasil menyelesaikan masa jabatannya dikarenakan PDIP mengusulkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Bapak Indonesia sebagai Presiden Indonesia yang ke 7 bersama Jusuf Kalla dan Ma'ruf Amin yang berhasil bertahan hingga periode kedua yang sebentar lagi akan tuntas di tahun 2024 mengingat sudah adanya

pembatasan kekuasaan pada UUD 1945 yang sudah direvisi dan mengharuskan pemangku kekuasaan hanya menduduki dua periode saja dengan maksimal 10 tahun masa jabatan.

Seperti yang kita ketahui bahwa keduanya berfokus pada pembangunan di Indonesia. Jokowi selalu menitikberatkan ekonomi, infrastruktur dan juga investasi yang hampir kurang lebih mirip dengan kebijakan pada era orde baru. Adalah Soeharto dengan keberhasilannya membangun TMII (Taman Mini Indonesia Indah) yang kemudian dibangun pada tahun 1972 lalu diresmikan pada tahun 1975. Pun Jokowi yang dapat membangun jalur Tol lintas pulau seperti jalur Tol antar Lampung menuju Palembang, ada juga pembangunan MRT (*Mass Rapid Transit*) moda transportasi kereta listrik bawah tanah di Jakarta tahun 2019.

Kesamaan lain dapat kita lihat dari keduanya yang sama lemahnya dalam menindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada masa orde baru tepatnya pada tahun 1967 pada awal kepemimpinannya Soeharto begitu ambisius dalam banyak hal, termasuk salah satunya pada kasus pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan untuk melegitimasi masa awal kekuasaannya, karena pada masa itu sebuah badan yang menangani modal asing terbentuk dengan nama BPPM (Badan Pertimbangan Penanaman Modal) berbuat ulah, yang mana menurut Departemen Perindustrian BPPM ini sangat berbelit dalam segi prosedur sehingga membuka celah-celah korupsi yang menyebabkan meluasnya patronase birokrasi bagi banyak pengusaha. Dengan mengusung tema 'Bandung bergerak, mahasiswa menggugat' masyarakat berdemo menyuarakan kekecewaannya atas itu (Febari Rizki, 2015).

Berangkat dari keresahan masyarakat inilah yang membuat Soeharto turun tangan dan membentuk sebuah tim bernama TPK (Tim Pemberantas Korupsi) yang dikepalai oleh Jaksa Agung Letnan Sugih Anto pada tahun yang sama, yakni 1967 melalui Keppres 228 yang menghasilkan penyerahan 172 kasus korupsi yang terjadi hingga tahun 1970. Namun kekecewaan kembali timbul tatkala laporan dari Letnan Jenderal Ali Said mengatakan dari 170 kasus dan 144 kasus yang tuntas, hampir semuanya adalah kasus-kasus kecil saja yang tidak begitu berdampak besar seperti kasus yang belum terpecah seperti kasus Pertamina, Bulog, Cv waringin, dan lainnya. Maka setelah laporan itu “panas” adalah kondisi yang begitu terasa, protes hadir dimana-mana. Maka atas ketidakpuasan masyarakat, untuk menenangkan konflik tersebut Soeharto kembali membuat tim baru dengan nama Komisi empat pada 31 Januari 1970, mereka bertugas untuk mengusut dan mencari jalan atas permasalahan tersebut (Febari Rizki, 2015).

Akan tetapi hal ini kembali membuat publik kecewa, pasalnya ternyata tim komisi empat yang dikepalai oleh Wilopo yang seorang mantan Perdana Menteri ini, hanya bersifat sementara dan berakhir pada bulan Juni di tahun yang sama. Hasilnya pun sangat kurang memuaskan karena hanya berupa laporan hasil penyelidikan saja yang diserahkan langsung pada kejaksaan. Satu diantara hasil penyelidikannya adalah mengenai betapa lihaihnya Pertamina di bawah kekuasaan Ibnu sutowo memainkan peran antagonis, diketahui Ibnu membayar banyak Jendral untuk menutupi banyaknya pelanggaran yang dilakukan termasuk dengan tidak membayar pajak di beberapa kesempatan. Namun Pertamina Di bawah kekuasaan Ibnu Sutowo ini berhasil menjadi yang terbaik diantara semua BUMN (Badan

Usaha Milik Negara) lain, yang maka dari itu diampunilah ia atas semua kesalahannya berkat jasanya tersebut (Febari Rizki, 2015).

Disamping peliknya perihal perekonomian di Indonesia hingga akhir masa jabatannya pada tahun 1998 Soeharto diberhentikan dengan salah satu alasannya adalah ketidakpuasan masyarakat serta lemahnya beliau pada pihak swasta dan orang-orang yang tega melakukan tindak korupsi (Febari Rizki, 2015).

Tahun-tahun pemberontakan dengan dimenangkannya rasa ketidakpuasan rakyat pada tindak korupsi telah terjadi pada era orde baru, namun bahkan setelah Reformasi pun yang kali ini dipikulkan pada tangkup kekuasaan Jokowi tetap saja terjadi tindak kejahatan yang sengit pada perekonomian Indonesia saat ini. Setelah kasus penangkapan Setya Novanto, Jokowi yang hanya memiliki sekitar 40% anggota parlemen yang memihaknya dengan 60% perkiraan oposisi, hadir dalam keadaan pincang, target yang salah menyebabkan langkah yang salah pula yang berakibat pada pelemahan komisi paling penting dalam urusan menangani tindak pidana korupsi yakni KPK, lembaga pemberantasan korupsi yang akhirnya menjadi bukti bahwa pada era ini pun Indonesia kalah pada para koruptor (AK Umam, 2019).

Selain memiliki julukan yang sama, kelemahan yang sama, sifat otoriter dalam kedaulatan demokrasi pun ada dalam kisaran yang kurang lebih mirip. Soeharto dan Jokowi ternyata memiliki aspek stabilitas politik dalam penegakkan hukum yang sama. Mereka sama-sama memiliki cara untuk membungkam yang menurut mereka menghalangi kepemimpinannya melalui suatu kebijakan yang merupakan keuntungan mereka sebagai pemimpin, ada yang menghilang setelah

melapor dan ada yang diadili setelah mengujarkan kebencian, *hoax* dan mengganggu keamanan negara. Dalam era Orde Baru kita tahu bahwa latar belakang yang menjadi dasar ketegasan itu timbul karena aliran darah kemiliterannya bahkan memiliki julukan Dwi Fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) (Adiwijoyo, 2000).

Gambar 1.1
Duduk Perkara Konflik Desa Wadas



Sumber: Kompas

Pada era Jokowi pun sama saja, dilansir dari kompas.com baru ini dikabarkan warga desa Wadas di Purworejo Jawa Tengah mengalami pengepungan oleh ratusan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia) bersenjata dengan total 64 sipil yang ditarik aparat untuk diinterogasi. Hal ini dikarenakan aksi warga desa yang menentang adanya pembangun waduk yang akan memasok air secara khusus untuk bandara Yogyakarta yang menurutnya dapat merusak ekosistem di desa dan berkurangnya pasokan air bagi warga dengan profesi petani. Hal ini menyebabkan persamaan bawah baik era Soeharto dan

Jokowi, keduanya menguasai alat negara dalam hal ini adalah satuan keamanan nasional untuk memerangi sipil itu sendiri.

Namun, setelah banyak kesamaan latar belakang dan gaya kepemimpinan keduanya di atas tentu ada pula hal yang membedakan antara Soeharto dan Jokowi. Yakni mengenai bagaimana cara Soeharto maupun Jokowi menangani kasus hubungan kerjasama kebijakan luar negeri yang dalam hal ini adalah hubungan kerjasama dengan Cina. Hal tersebut adalah mengenai persepsi Soeharto yang ia sampaikan pada pergantian kekuasaan kepemimpinan sebelumnya, tentang betapa Soeharto cenderung menolak berhubungan dengan Cina yang kerap kali etnisnya menjadi kambing hitam (A Yogaswara, 2012).

Faktor eksternal dan Internal dapat begitu berdampak hingga bisa memengaruhi perilaku politik bahkan mengguncang dua atau lebih negara untuk melakukan perlawanan. Sebagai asumsi mendasar dari pernyataan ini adalah menyangkut tindakan internasional yang didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan yang dibentuk oleh pelaku politik domestik yang diakui, yang mana para pemimpin negara baik secara individual atau rezimnya, bertindak sebagai aktor utama dalam proses diputuskannya kebijakan. Yang berarti pernyataan ini memberikan penekanan utamanya kepada analisis jaringan birokrasi organisasi yang begitu kompleks di mana tentu saja berkubang dengan segala prosedur-prosedur kelembagaannya (Paul A, 1987).

Memang dapat dikatakan bahwa Soekarno cukup berteman baik dengan Cina walaupun tentu diketahui bahwa Soekarno adalah orang begitu mencintai Indonesia hingga melakukan segala upaya untuk menghilangkan jejak dari kaki

asing yang menapak di Indonesia dengan melakukan serangkaian upaya seperti membeli kembali seluruh aset Indonesia dari asing dengan langkah menasionalisasi aset negara Indonesia. Hal itu tentu menyebabkan ketidaksukaan dari pihak asing termasuk Cina yang kerap diberikan banyak kebijakan mengenai banyak larangan seperti peraturan tak diperkenalkannya berjualan di sekitar pedesaan (Fikri, Asyrul. Anju Nofarof H, 2021).

Keretakan tersebut oleh Soeharto kemudian dilanjutkan hingga berujung pada pemutusan hubungan diplomatik. Soeharto bahkan mulai mendeklarasikan ketidaksukaannya secara gampal di awal kepemimpinannya dalam pidatonya di depan MPRS (1966) yang terkandung dua hal utama mengenai stabilitas politik keamanan juga pembangunan ekonomi. Sebab itulah, pada awal pemerintahannya Soeharto berfokus pada upaya menghapus keberadaan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dianggap sebagai ‘penjahat’, sehingga pihak yang membantu PKI yakni Cina, tentunya juga dianggap sebagai lawan yang harus diperangi, menilik Cina pada saat itu berada dalam kekuasaan Mao Zedong gencar menyebarkan aliran komunismenya ke seluruh pelosok Asia, membuat Soeharto menganggap hal tersebut sebagai ancaman yang harus dihindari (Mansbach & Rafferty, 2012).

Apalagi dalam upayanya, Mao Zedong kerap memberikan dukungan kepada setiap partai komunis untuk menundukkan kekuasaan di negara tempat mereka berada termasuk di Indonesia. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Mao yang mengacu pada apa yang pernah dilakukan oleh Joseph Stalin (Mansbach & Rafferty, 2012).

Hal-hal mengenai Cina begitu sensitif pada masa itu, pernah pemerintahan Indonesia di bawah Soeharto bereaksi dengan keras terhadap tindakan dan aksi orang-orang Cina yang melakukan protes di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking. Maka untuk memberangus akar yang sudah tumbuh dari bibit komunisme yang ada di dalam pemerintahannya, adalah wajar apabila Soeharto dengan berani mengambil kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina pada tahun 1967. Ketegasannya nampak terlihat dari pernyataan dalam biografinya, dimana ia menyampaikan bahwa: “Terhadap siapapun yang akan mengembalikan PKI di Indonesia, alat-alat negara akan bertindak dengan tegas” (Rohman, 2003).

Di dalam Instruksi Presiden no 14 (1967), Orde baru sangat menentang keras sesuatu yang berhubungan dengan etnis Tionghoa. Segala bentuk kegiatan seperti keagamaan, adat istiadat Cina serta aliran kepercayaannya sudah tidak diperkenankan lagi. Penggunaan nama dengan unsur Tionghoa pun tidak diperkenankan dan wajib melakukan pergantian nama dengan unsur yang lebih Indonesia yang diiringi oleh dikeluarkannya Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang mengusung perubahan nama. Kebijakan mengenai perdagangan yang disahkan oleh Soekarno pun ternyata tidak digantikan oleh Soeharto terkait larangan terhadap etnis Cina untuk melakukan perdagangan di wilayah pedesaan (Peraturan Pemerintah, 1959).

Namun, berbeda dengan Soeharto yang menolak kekiri-kirian walaupun sama memiliki fokus stabilitas politik keamanan dan pembangunan ekonomi yang hampir sejalan, Jokowi justru menerima uluran tangan kerjasama untuk berkolaborasi dengan Cina apalagi dari segi pembangunan.

Kerjasama tersebut melahirkan transaksi sebagai contoh dari bentuk kerjasama mega proyek dengan Cina, terjadi begitu banyak buruh Cina yang dipekerjakan pada di tempat penggalian tambang di Indonesia. Hal ini diumumkan bahkan secara langsung pada acara yang digelar oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Bogor, mengenai buruh paruh waktu yang dipekerjakan dengan kontrak waktu 4-6 bulan dengan jumlah mencapai 23.000 orang. Jumlah yang cukup banyak karena setelah kabar ini tersebar protes pun terjadi mengingat jumlah 23.000 orang itu apabila yang dipekerjakan adalah orang pribumi, tentu akan membantu sekali perekonomian masyarakat daerah.

Selain itu, transaksi dengan Cina memang kerap kali menimbulkan kontroversi. Salah satu contoh yang sempat membuat masyarakat geram adalah lemahnya menindak pelanggaran yang dibuat oleh sipil Cina. Belakangan dilansir dari liputan6.com, penanganan kasus nelayan asal Indonesia di kapal Cina, yang dianggap kurang tanggap. Dikatakan beberapa warga lokal bekerja pada kapal Cina yang mendapatkan diskriminasi tidak diberikannya air minum yang bersih hanya diperbolehkan minum air laut yang menyebabkan beberapa nelayan Indonesia mati karena tidak sehatnya apa yang mereka minum. Hal ini tentu menyebabkan sentimen publik terhadap Cina semakin memanas.

Gambar 1.2

Pemerintah Pulangkan 13 ABK WNI dari Kapal Long Xing



Sumber: Liputan6.com

Tahun 2015, sejak awal kepemimpinannya, nilai perdagangan Cina-Indonesia meroket hingga US\$48,2 M yang apabila dibandingkan dengan tahun 2005 hanya mencapai angka US\$8,7 M yang mana perbedaannya begitu ketara sekali dengan rentang waktu yang dapat dikatakan singkat. Pada saat ini, kedudukan Jepang sebagai mitra dagang terbesar di Indonesia dapat disaingi posisinya oleh Cina. Dalam Rezim ini, Jokowi menggandeng Cina untuk berinvestasi di sejumlah proyek infrastruktur pembangunan besar negara. Termasuk di dalamnya, proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung. Indonesia menembak lebih banyak investasi Cina masuk hingga menempatkan Negeri Tirai Bambu ini sebagai investor asing terbesar di posisi ketiga bagi negara setelah Singapura dan Jepang.

Baik Soeharto maupun Jokowi melakukan gaya kepemimpinan atau perilaku (dorongan) untuk membuat suatu kebijakan. Kebijakan ini disebut kebijakan luar negeri yang merupakan suatu gagasan dalam membentuk suatu

rumusan dengan tujuan untuk memecahkan adanya suatu permasalahan maupun bertujuan untuk melakukan perubahan dalam suatu wilayah. Karena setiap negara pasti memiliki kepentingan terkait perekonomian, stabilitas negara, juga kepentingan elit politik. Pun setiap negara memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan sesuai dengan arahan dari tujuan yang sudah ditetapkan (KJ Holsti, 1983).

Sejarah panjang perjalanan lembaga Kepresidenan Indonesia memiliki banyak lika-liku politik dengan ciri khas berbeda. Seperti perubahan pada konstitusi yang terjadi berkali-kali, periode yang dapat dimanipulasi berkat diksi berbeda, dan lainnya. Berangkat dari uraian di atas yang dalam hal ini Soeharto dan Jokowi memiliki hal berbeda yang begitu menarik di antara banyak kesamaan, membuat penulis terusik serta tertarik untuk mengajukan hal ini untuk diteliti lebih jauh lagi dengan menggabungkan penelitian gaya kepemimpinan dan juga kebijakan politik luar negeri. Karena sesungguhnya kebijakan luar negeri dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni peperangan, kerjasama ekonomi, dan yang terakhir perdamaian, lalu langkah manakah yang digunakan oleh Soeharto dan Jokowi? Untuk membandingkan lebih jauh fenomena yang ada di baliknya, maka proposal ini diajukan dengan judul **“Perbandingan Gaya Kepemimpinan Jokowi dan Soeharto Dalam Menjalinkan Kerjasama Dengan Cina)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan proposal ini tidak melebar, maka penulisan proposal ini berfokus pada hubungan antara gaya kepemimpinan Jokowi dan Soeharto sebagai kepala negara Indonesia di era berbeda dalam menjalin hubungan kerjasama dengan

Cina. Pertanyaan berfokus, bagaimana Perbandingan gaya kepemimpinan Jokowi dan Soeharto sebagai kepala negara di era berbeda dalam menjalin kerjasama dengan Cina melalui kebijakan luar negeri?

C. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian lebih tertata dan fokus utamanya sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah maka penulis membatasi penelitian ini dalam konteks hubungan antara gaya kepemimpinan Jokowi dan Soeharto sebagai kepala negara Indonesia di era berbeda dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Cina.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, mendalami dan menjelaskan terkait tujuan dan manfaat, sebagai berikut:

1. Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait gaya kepemimpinan Jokowi dan Soeharto sebagai kepala negara Indonesia di era berbeda dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Cina, sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenisnya dimasa yang akan datang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aktor yang terlibat dalam permasalahan ini, seperti pemimpin berikutnya dalam menyikapi jalinan kerjasama dengan Cina, serta secara

umum bagi masyarakat agar mengetahui informasi yang sebenarnya tentang keterkaitan hubungan tersebut.